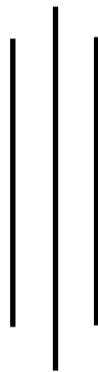




**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PEMATANG SIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA  
PEMATANG SIANTAR TAHUN  
2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar dapat Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD). Penyusunan Laporan Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) berdasarkan pada Permendagri 86 tahun 2017 dan pemetaan program dan kegiatan yang terdapat dalam Rancanangan renja mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 sehingga laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembahasan yang terkait dengan tugas Pemerintahan Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar. Lebih khusus Laporan Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) ini diperuntukan sebagai pendukung data bagi Pimpinan dalam rangka penetapan kebijakan lebih lanjut.

Kami sadari bahwa penyusunan Laporan Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Ranwal Renja – OPD) ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran masukan dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan agar penyusunan Laporan Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) Tahun berikutnya dapat lebih sempurna.

Demikian penyusunan Laporan Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2024 – 2025.

Pematangsiantar, 17 Maret 2023

**Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PEMATANG SIANTAR**

  
**Drs. JULHAM SITUMORANG, M.Si**  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19700528 199601 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1
1.4. Sistematika Penulisan .....	1
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT</b>	
<b>DAERAH</b> .....	3
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Perangkat Daerah.....	3
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..	27
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah .....	30
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD .....	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	43
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT</b>	
<b>DAERAH</b> .....	44
3.1. Telahan terhadap Kebijakan Nasional .....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	47
3.3. Program dan Kegiatan .....	48
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH</b> .....	67
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	67
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebut Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD). Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpedoman pada Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Renstra- OPD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-OPD) Kota Pematang Siantar.

### **1.2 Landasan Hukum**

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) disusun berdasarkan perundang-undangan dan peraturan antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- d. Permendagri 86 Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja-OPD ini adalah sebagai Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun, membuat dan melaksanakan Program dan Kegiatan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga seluruh kegiatan diantara tiap OPD dalam jajaran Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar Tahun 2024 – 2025, adalah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar.

## **BAB I       PENDAHULUAN**

### **1.1       Latar Belakang**

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**



2	15	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase ketersediaan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan</b>	100 %	2.466.751.806	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	22	dokumen	22	
2	15	02	2.01		<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ</b>	2 dokumen	150.000.000,00	-		-	-	-	-	-	0		-	-
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000	-		0	0	0	0	-	0		-	-
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000			0		0		-	0		-	-
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					0		0		-	0		-	-





2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun			0		0		0		-	0		-	-
2	15	2	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun			-		0		0		-	0		-	-
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2 unit	200.000.000,00	-		0		0		-	0		-	-
2	15	02	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan pendukung)	40 unit	100.000.000,00	-		0		0		-	0		-	-
2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 orang	20.000.000	-		0		0		-	0		-	-
2	15	02	2.04		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</b>	<b>7 dokumen</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>Laporan</b>	<b>-</b>	<b>laporan</b>	<b>-</b>	<b>laporan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2	15	02	2.04	01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 dokumen	50.000.000,00			0		0		-	0		-	-
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 laporan	100.000.000	-	laporan	0	laporan	0	laporan		0		-	-
2	15	2	2,05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Jumlah dokumen, unit, SDM pelaksanaan pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>10.218 dokumen</b>	<b>547.000.000,00</b>	-	<b>unit</b>	-	<b>unit</b>	-	<b>unit</b>		<b>2,00</b>	<b>unit</b>	2	0
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit	250.000.000,00	-		0	unit			-	2	unit	2	200

2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya			-	0					0			-	-	
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	5400 unit	55.000.000,00	-	0	0			-	0			-	-	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.800 dokumen	115.000.000	-	0	buah	0			0	buah		-	-	
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 laporan	10.000.000	-						-	0			-	-
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 unit	110.000.000	-	unit	-	unit	-	unit		0	unit		-	-

2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 laporan	7.000.000	-	0	0	-	0	-	-	-	-		
2	15	02	2.06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>280 dokumen</b>	<b>392.751.806,00</b>	-	<b>Laporan</b>	-	<b>laporan</b>	-	<b>laporan</b>	-	<b>laporan</b>	-	-	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 laporan	215.000.000	-	laporan	0	laporan	0	laporan	-	0	laporan	-	-

2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	274 unit	152.751.806	-		0		0			0		-	-
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			-		0		0			0		-	-
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			-		0	0			-	0		-	-

2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 laporan	25.000.000	-	laporan	0	laporan				0	laporan	-	-
2	15	02	2.07		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>25000000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>		-	-
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	2 dokumen	10.000.000	-		0		0		#DIV/0!	0		-	-
2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 orang	10.000.000,00	-						#DIV/0!	0		-	-
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 laporan	5.000.000	-		0		0		-	0		-	-
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi			0		0		0		-	0		-	-



2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	5.000.000	-	0	0	-	0	-	-
2	15	02	2.11		<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>11.000.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	-	0	-	-
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-			-	0	-	-



2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	11.000.000	-	0	0	-	0	-	-
2	15	02	2.13		<b>Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>60.000.000</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-
2	15	02	2.13	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	-	0	0	-	0	-	-

2	15	02	2.13	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	10.000.000	-		0		0		-	0		-	-
2	15	02	2.14		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0 laporan</b>	-	-		-		-		-	0		-	-
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			-		0		0		-	0		-	-

2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota			-		0		0		-		0		-	
2	15	02	2.16		<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>10.000.000,00</b>	-		-		-		-		<b>0</b>		-	
2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0		0		0		-		0		-	

2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	10.000.000	-	0	0	-	0	-	-	-	-		
2	15	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan</b>	<b>B</b>	<b>18.965.959.735,00</b>	-	<b>dokumen</b>	-	<b>dokumen</b>	-	<b>dokumen</b>	-	<b>197,00</b>	<b>dokumen</b>	197	-!
2	15	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>dokumen</b>	<b>0</b>	<b>dokumen</b>	<b>0</b>	<b>dokumen</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	20.000.000	-		0		0		-	0		-	-

2	15	1	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>177 orang</b>	<b>6.980.000.000,0</b>	<b>0</b>	<b>orang</b>	<b>0</b>	<b>orang</b>	<b>0</b>	<b>orang</b>	<b>-</b>	<b>75</b>	<b>orang</b>	<b>75</b>	<b>42</b>
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	177 orang	6.980.000.000,00	-	orang	0	Orang	0	orang	-	75	orang	75	42
2	15	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>254 laporan</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
2	15	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unkit	15.000.000	-		0		0		-	0		-	-
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	177 orang	110.000.000,00	-		0		0		-	0		-	-

2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	10.000.000	-	0	0	-	0	-	-
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	20.000.000	-	0	0	-!	0	-	-
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	30.000.000,00	-	0	0	-!	0	-	-
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-	0	0	-!	0	-	-!

2	15	1	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>284 laporan</b>	<b>381.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>laporan</b>	<b>0</b>	<b>laporan</b>	<b>0</b>	<b>laporan</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>48</b>	<b>laporan</b>	<b>48</b>	<b>17</b>
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	15.000.000	-		0		0		-!	0		-	-
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39 paket	95.000.000	-	paket	0	paket	0	paket	-!	7	paket	7	18
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 paket	13.000.000	-		0		0		-!	0		-	-
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	18.000.000	-	paket	0	paket	0	paket	-!	1	paket	1	7

2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 paket	75.000.000,00	-	paket	0	paket	0	paket	-!	4	paket	4	16
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175 laporan	165.000.000,00	-	laporan	0	laporan	0	laporan	-!	36	laporan	36	21
2	15	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>26 unit</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>unit</b>	<b>0</b>	<b>unit</b>	<b>0</b>	<b>unit</b>	-!	<b>0</b>		-	-
2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-		0		0		-!	0		-	-!



2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	30.000.000,00	-		0		0		-!	0		-	-
2	15	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	25.000.000,00	-		0		0		-!	0		-	-
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	50.000.000,00	-	unit	0	unit	0	unit	-!	0		-	-
2	15	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	150.000.000,00	-		0		0		-!	0		-	-
2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0		0		0		-!	0		-	-!

2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	81 laporan	10.664.000.000,00	0	1	0	laporan	0	laporan	-!	58	laporan	58	72
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	9.000.000,00	-	laporan	0	laporan	0	laporan	-!	3	laporan	3	25
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	80.000.000,00	-	laporan	0	laporan	0	laporan	-!	3	laporan	3	25
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	57 laporan	10.575.000.000,00	-	laporean	0	laporan	0	laporan	-!	52	laporan	52	91

2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49 unit	480.959.735,00	-		0	unit	0	unit	-!	16	unit	16	33
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	60.000.000,00	-	unit	0	unit	0	unit	-!	2	unit	2	50
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	250.000.000,00	-		0		0		-!	10	unit	10	71
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 unit	60.000.000,00	-	unit	0	unit	0	unit	-!	4	unit	4	14



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelayanan transportasi dan penataan perparkiran di Kota Pematangsiantar masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasan serta belum optimalnya legalitas yang mendukung pelaksanaan di lapangan.

Namun demikian, pelayanan transportasi yang dilakukan selama ini juga memberikan hasil yang positif antara lain semakin baiknya prasarana lalu lintas, semakin meningkatnya komitmen untuk tertib berlalu lintas dan berubahnya pola pikir aparatur Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam mendukung tertib lalu lintas.

Untuk melaksanakan fungsi dan memberikan hasil yang positif kepada masyarakat Kota Pematang Siantar Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan dan pelayanan jasa pada perhubungan darat ( Lalu Lintas Angkutan Jalan);
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pengelolaan dan pelayanan jasa dalam perhubungan darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan)
4. Pengawasan dan pengamanan pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal
5. Pengelolaan lokasi parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor
6. Pengaturan lokasi tempat – tempat penyeberangan jalan
7. Perumusan dan pelaksanaan aturan tentang pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor dan tidak bermotor
8. Pengelolaan lokasi dan tempat pemberhentian/halte untuk kendaraan umum.
9. Pengadaan, penetapan, pengaturan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas serta tanda – tanda jalan.
10. Pemberian rekomendasi izin dan pengawasan bengkel umum untuk kendaraan bermotor
11. Pemberian rekomendasi izin usaha angkutan, trayek angkutan, trayek angkutan kota, insidentil dan dispensasi pemakaian jalan.
12. Penetapan ketentuan – ketentuan tambahan mengenai susunan alat- alat pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan orang/ barang secara tertib dan teratur .
13. Penetapan larangan penggunaan jalan – jalan tertentu demi kelancaran arus lalu lintas, dengan persetujuan Gubernur untuk jalan Propinsi dan persetujuan pemerintah pusat untuk jalan nasional.

14. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di wilayah daerah kota dengan persetujuan Polres, Gubernur untuk jalan Propinsi dan persetujuan pemerintah pusat untuk jalan nasional.
15. Penetapan kecepatan maksimal bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan kota, jalan Propinsi dan jalan nasional yang berada dalam wilayah kota.
16. Pelaksanaan kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas serta larangan penggunaan jalan kota bagi jenis dan macam kendaraan bermotor tertentu
17. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat dan wilayah kota.
18. Penyelenggaraan perlengkapan jalan pada jaringan jalan.
19. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan .
20. Penetapan tarif untuk angkutan darat dalam jaringan trayek kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
21. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
22. Penyelenggaraan bina usaha angkutan orang dan barang.
23. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing – masing, dengan format tabel T-C 30 sebagai berikut:

**TC.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**  
**KOTA PEMATANGSIANTAR**

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ			100%	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik			-	96.25%	97.13%	97.52%	-		97.13%	97.52%	
3	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan			-	60%	78%	90%	-	28.57%	78%	90%	
4	Persentase titik Kemacetan Lalu Lintas yang teratasi			-	50%	60%	70%	-	33.33%	60%	70%	
5	Persentase Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji KIR			-	65%	67%	75%	-	12.77%	67%	75%	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			-	78%	79%	80%	-	-	79%	80%	
7	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan			-	CC	B	B	-		B	B	

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan kota pematangsiantar dirincikan dalam penentuan isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan Prasarana dan fasilitas Perhubungan (Rambu, Marka, Traffic Light, Rambu, ,warning light, ATCS, Halte ,pagar pengaman jalan, road barrier, traffic cone, cermin tikungan,Terminal tipe c, alat uji,Gedung PKB)
2. Peningkatan pengawasan dan pengamanan dalam rangka kelancaran lalu lintas angkutan jalan
3. Peningkatan pengelolaan , penataan parkir dan penertiban parkir liar
4. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang memadai
5. Peningkatan kerja sama dengan para stake holder dalam pengawasan dan penindakan kendaraan bermotor yang melanggar aturan
6. Peningkatan Disiplin keselamatan dalam berlalu lintas
7. Peningkatan profesioalisme aparatur Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja OPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program – program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program – program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Program Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan defenitif untuk diajukan menjadi rencana kerja.

Berikut adalah tabel review rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar :



**Tabel T-C. 31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kota Pematang Siantar**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar**

No	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2024				Program/Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(8)
	<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</i>					<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</i>					
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	P. Siantar	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan	B	18.408.173.665,00 0	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	P. Siantar	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan	B	17.561.794.855,000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	P. Siantar	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100 %	6.970.813.665,00	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	P. Siantar	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100 %	6.289.915.703,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	P. Siantar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	166 orang	6.970.813.665,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	P. Siantar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	6.289.915.703,00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	P. Siantar	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100 %	135.000.000,00	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	P. Siantar	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100 %	-	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	P. Siantar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	170 paket	100.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	P. Siantar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	163 paket	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	P. Siantar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	P. Siantar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	P. Siantar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	25.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	P. Siantar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	-	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan 'Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>371.000.000,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan 'Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>367.883.772,00</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	P. Siantar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	22.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	P. Siantar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	782.160	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P. Siantar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 paket	92.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P. Siantar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 paket	80.127.686	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	P. Siantar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	P. Siantar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	1.884.725	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	P. Siantar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	P. Siantar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	5.998.800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	P. Siantar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	72.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	P. Siantar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18 paket	66.049.401	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	P. Siantar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 laporan	160.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	P. Siantar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 laporan	213.041.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	
	Pengadaan Mebel	P. Siantar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	10.000.000,00	Pengadaan Mebel	P. Siantar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	P. Siantar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	25.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	P. Siantar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>100 %</b>	<b>10.644.360.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>100 %</b>	<b>10.483.629.200,00</b>	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	P. Siantar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	6.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	P. Siantar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.562.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	P. Siantar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	75.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	P. Siantar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	88.807.200,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	P. Siantar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	53 laporan	10.563.360.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	P. Siantar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	53 laporan	10.389.260.000,00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>252.000.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>420.366.180,00</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	P. Siantar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	50.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	P. Siantar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	123.470.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	P. Siantar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	101.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	P. Siantar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	275.893.830,00	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	P. Siantar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	50.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	P. Siantar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	21.002.350,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	P. Siantar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	P. Siantar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	-	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Persentase ketrersediaan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan</b>	<b>100 %</b>	<b>2.394.205.000,00</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Persentase ketrersediaan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan</b>	<b>100 %</b>	<b>540.878.320,00</b>	
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Jumlah penyediaan perlengkapan jalan yang terpasang dan terpelihara</b>	<b>123 unit</b>	<b>760.000.000,00</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Jumlah penyediaan perlengkapan jalan yang terpasang dan terpelihara</b>	<b>18 unit</b>	<b>219.063.040,00</b>	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota	20 unit	150.000.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota	0 unit	-	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	53 unit	300.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 unit	19.063.040	
	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	P. Siantar	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Jalan di Jalan Kota	20 unit	10.000.000	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	P. Siantar	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Jalan di Jalan Kota	0 unit		

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	P. Siantar	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	30 unit	300.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	P. Siantar	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	8 unit	200.000.000	
	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan terminal Tipe C</b>	<b>100 %</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Jumlah pengelolaan terminal Tipe C</b>	<b>100 %</b>		<b>-</b>
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	P. Siantar	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	P. Siantar	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	0 dokumen		-
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</b>	<b>7 dokumen</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</b>	<b>0 dokumen</b>		<b>-</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	P. Siantar	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 dokumen	150.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	P. Siantar	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 dokumen		-

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 laporan	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0 laporan	-	
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>100 %</b>	<b>430.000.000,00</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Jumlah dokumen, unit, SDM pelaksanaan pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>100 %</b>	<b>68.000.000,00</b>	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	P. Siantar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 unit	150.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	P. Siantar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 unit	-	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	P. Siantar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 orang	25.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	P. Siantar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 orang	-	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	P. Siantar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	5.150 unit	50.000.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	P. Siantar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	- unit		

	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	P. Siantar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.200 dokumen	105.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	P. Siantar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.000 dokumen	25.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	P. Siantar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 unit	100.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	P. Siantar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7 unit	43.000.000	
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>503.205.000,00</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>253.815.280,00</b>	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 laporan	410.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 laporan	246.430.780	
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	P. Siantar	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	70 unit	53.205.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	P. Siantar	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0 unit		



	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 dokumen	20.000.000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 dokumen	-	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 laoran	20.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 laoran	7.384.500	
	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>100 %</b>	-	
	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	P. Siantar	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 orang	10.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	P. Siantar	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 orang		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	P. Siantar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	P. Siantar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 laporan		

	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	P. Siantar	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2 laporan	10.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	P. Siantar	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0 laporan	0
	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>100 %</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	P. Siantar	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 laporan	6.000.000,00	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	P. Siantar	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0 laporan	-
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	P. Siantar	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 laporan	10.000.000,00	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	P. Siantar	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0 laporan	-
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6 laporan</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0 laporan</b>	<b>-</b>

	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	P. Siantar	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 laporan	100.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	P. Siantar	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 laporan	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	0 laporan		
	<b>Jumlah</b>				<b>20.802.378.665,00</b>	<b>Jumlah</b>				<b>18.102.673.175</b>	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari hasil review usulan Rancangan Awal Renja Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar berbeda dengan Analisis Hasil Kebutuhan hal ini disebabkan adanya batasan pagu yang telah ditetapkan.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui forum - forum Musrenbang Kecamatan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota tidak memiliki Usulan kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan kota melalui Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubnugan Kota Pematangsiantar.

Tabel TC.32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para  
Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kota Pematang Siantar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>				
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>				
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah plank papan nama jalan yang terpasang		tidak ada dalam nomenklatur Dinas Perhubungan

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Keterkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar dengan RPJMN yang dikaitkan terhadap arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yaitu keselamatan dan keamanan transportasi, hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dan sasaran kinerja pada Restra Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Dalam rangka ikut mensukseskan dan mendukung Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar, Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar menyusun Rencana Strategis (renstra) dengan menetapkan tujuan yaitu : **“Tewujudnya Pengendalian Transportasi yang Optimal”**.

Keberadaan Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD  
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur wilayah kota sesuai dengan peruntukannya	Persenntase kesesuaian tata ruang	Terwujudnya pengendalian transportasi yang optimal	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ
								Meningkatkan Kualitas pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi
									Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan UJI KIR

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
									Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan
								Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan

TC. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NOO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2023	2024	2025	2026	2027
	Terwujudnya pengendalian transportasi yang optimal		Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik		96.25%	97.13%	97.52%	97.84%	98.34%
		Meningkatkan ketersediaan fasilitas LLAJ	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	72.14%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Kualitas pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	n/a	50%	60%	70%	80%	90%
			Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan UJI KIR	56.25%	65%	70%	75%	80%	85%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	75%	78%	79%	80%	85%	87%
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan		CC	B	B	B	B



### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar melaksanakan beberapa program dan kegiatan, yaitu :

Kode					Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan
<b>2</b>	<b>15</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten /Kota</b>
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</b>
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota Kabupaten/ Kota
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.02	3	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2,03</b>		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>
2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
2	15	2	2,03	2	Pembangunan Gedung Terminal
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2	15	02	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan pendukung)
2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2.05</b>		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</b>
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota

<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.07</b>		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota</b>
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.08</b>		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.09</b>		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.11</b>		<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.13</b>		<b>Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	15	02	2.13	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

2	15	02	2.13	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.14</b>		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.16</b>		<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
2	15	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	15	1	2,07	5	Pengadaan Mebel
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	15	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud
2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	15	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Untuk kegiatan dan rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun 2024 dan prakiraan maju 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan**

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	15				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>								
2	15	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan	P. Siantar	B	17.561.794.855,000	APBD		B	18.592.255.402,00
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	P. Siantar	0	-	APBD		100 %	10.000.000

2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	P. Siantar			APBD		1 dokumen	10.000.000,00
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	P. Siantar	<b>100 %</b>	<b>6.289.915.703,00</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>6.937.255.402,0</b>
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	P. Siantar	166 orang	6.289.915.703,00	APBD		170 orang	6.937.255.402,00
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>180.000.000,00</b>
2	15	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	P. Siantar			APBD		1 unit	10.000.000
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	P. Siantar	0 paket	-	APBD		175 paket	107.000.000,00
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	P. Siantar	0 orang	-	APBD		2 orang	13.000.000,00



2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	P. Siantar			APBD		100 orang	50.000.000,00
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>2,1</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>100 %</b>	<b>367.883.772,00</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>353.000.000,00</b>
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	P. Siantar	10 paket	782.160	APBD		12 paket	10.000.000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	P. Siantar	33 paket	80.127.686	APBD		35 paket	93.000.000
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	P. Siantar	4 paket	1.884.725	APBD			
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	P. Siantar	4 paket	5.998.800	APBD		11 paket	16.000.000
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	P. Siantar	20 paket	66.049.401	APBD		22 paket	73.000.000

2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	P. Siantar	160 laporan	213.041.000	APBD		165 laporan	161.000.000,00
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>100 %</b>	-	APBD		<b>100 %</b>	<b>245.000.000,00</b>
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	P. Siantar			APBD		2 unit	80.000.000,00
2	15	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	P. Siantar	0 unit	-	APBD		8 unit	15.000.000,00
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	P. Siantar	0 unit	-	APBD		10 unit	50.000.000,00
2	15	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	P. Siantar			APBD		1 unit	100.000.000,00
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>100 %</b>	<b>10.483.629.200,00</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>10.655.000.000,00</b>
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	P. Siantar	12 laporan	5.562.000,00	APBD		12 laporan	7.000.000,00

2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	P. Siantar	12 laporan	88.807.200,00	APBD		12 laporan	78.000.000,00
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	P. Siantar	53 laporan	10.389.260.000,00	APBD		53 laporan	10.570.000.000,00
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>100 %</b>	<b>420.366.180,00</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>212.000.000,00</b>
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	P. Siantar	2 unit	123.470.000,00	APBD		2 unit	55.000.000,00
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	P. Siantar	10 unit	275.893.830,00	APBD		12 unit	102.000.000,00
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	P. Siantar	22 unit	21.002.350,00	APBD		24 unit	55.000.000,00

2	15	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase ketersediaan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>100 %</b>	<b>540.878.320</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>2.418.147.050</b>
2	15	02	2.01		<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>APBD</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>50.000.000,00</b>
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	P. Siantar			APBD		1 laporan	50.000.000,00
2	15	02	2.02		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penyediaan perlengkapan jalan yang terpasang dan terpelihara</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>19 unit</b>	<b>219.063.040,00</b>	<b>APBD</b>		<b>143 unit</b>	<b>767.000.000,00</b>
2	15	02	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota	P. Siantar	0 unit	-	APBD		30 unit	152.000.000
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	P. Siantar	10 unit	19.063.040	APBD		53 unit	300.000.000
2	15	02	2.02	3	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Jalan di Jalan Kota	P. Siantar	0 unit		APBD		25 unit	12.000.000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	P. Siantar	9 unit	200.000.000	APBD		35 unit	303.000.000

2	15	2	2		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Cakupan pengelolaan terminal Tipe C</b>	<b>P. Siantar</b>	100 %	-	APBD		100 %	<b>679.147.050</b>
2	15	2	2,03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	P. Siantar			APBD		1 unit	679.147.050
2	15	02	2.04		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Jumlah dokumen penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</b>	<b>P. Siantar</b>	0 dokumen	-	<b>APBD</b>		<b>7 dokumen</b>	<b>100.000.000,00</b>
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	P. Siantar	0 dokumen	-	APBD		5 dokumen	50.000.000,00
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	P. Siantar	0	-	APBD		2 laporan	50.000.000
2	15	2	2,1		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Cakupan pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>P. Siantar</b>	100 %	<b>68.000.000,00</b>	APBD		100 %	<b>427.000.000,00</b>

2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	P. Siantar	0 unit		APBD		1 unit	155.000.000
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	P. Siantar	- unit		APBD		5.200 unit	52.000.000,00
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	P. Siantar	1.000 dokumen	25.000.000	APBD		4.400 dokumen	110.000.000
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	P. Siantar	7 unit	43.000.000	APBD		12 unit	105.000.000
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	P. Siantar			APBD		2 lapaoran	5.000.000
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>100 %</b>	<b>253.815.280,00</b>	APBD		<b>100 %</b>	<b>247.000.000,00</b>

2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	P. Siantar	3 laporan	246.430.780	APBD		2 laporan	200.000.000
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	P. Siantar	0 unit		APBD		13 unit	16.000.000
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	P. Siantar	0 dokumen	-	APBD		1 dokumen	5.000.000
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	P. Siantar	0 laporan		APBD		1 laporan	5.000.000
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	P. Siantar	4 laporan	7.384.500	APBD		4 laporan	21.000.000

2	15	02	2.07		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>100 %</b>	-	APBD		<b>100 %</b>	<b>27.000.000,00</b>
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	P. Siantar			APBD		2 dokumen	10.000.000
2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	P. Siantar	orang		APBD		1 orang	7.000.000,00
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	P. Siantar	0 laporan	0	APBD		2 laporan	10.000.000
2	15	02	2.08		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>100 %</b>	-	APBD		<b>100 %</b>	<b>16.000.000,00</b>
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	P. Siantar	0 laporan	-	APBD		4 laporan	6.000.000,00
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	P. Siantar	0 laporan	-	APBD		1 laporan	10.000.000,00



2	15	02	2.09		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>0 laporan</b>	-	APBD		<b>100 %</b>	<b>20.000.000</b>
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	P. Siantar			APBD		1 laporan	20.000.000
2	15	02	2.13		<b>Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	APBD		<b>0</b>	<b>0</b>
2	15	02	2.13	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	P. Siantar			APBD			

2	15	02	2.13	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	P. Siantar			APBD			
2	15	02	2.14		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>P. Siantar</b>	<b>100 %</b>	-	APBD		<b>100 %</b>	<b>85.000.000,00</b>
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	P. Siantar	0 laporan	-	APBD		1 laporan	85.000.000
					<b>Jumlah</b>				<b>18.102.673.175,00</b>				<b>21.010.402.452,00</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA**  
**DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

<b>Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan</b>	<b>Sasaran Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Sumber Dana</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan</b>			
<b>Sub Kegiatan :</b>			
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kelancaran pelayanan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan	APBD
<b>Kegiatan : Administrasi Umum</b>			
<b>Sub Kegiatan :</b>			
Penyediaan bahan logistik kantor	Kelancaran pelayanan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyediaan bahan logistik kantor	APBD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelancaran pelayanan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	APBD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelancaran pelayanan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	APBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelancaran pelayanan administrasi umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	APBD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran pelayanan administrasi umum	Jumlah Lapran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	APBD
Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran pelayanan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	APBD
<b>Kegiatan : Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
<b>Sub Kegiatan :</b>			
Penyediaan Jasa surat menyurat	Kelancaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	APBD
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kelancaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	APBD
<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
<b>Sub Kegiatan :</b>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelancaran pelaksanaan tugas aparatur	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelancaran pelaksanaan tugas aparatur	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	APBD
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kelancaran pelaksanaan tugas aparatur	Jumlah Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	APBD
<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>			
<b>Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kota</b>			
<b>Sub Kegiatan :</b>			
Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan kota	Meningkatkan kelancaran, keselamatan dan keamanan lalu lintas	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	APBD
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Meningkatkan kelancaran, keselamatan dan keamanan lalu lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	APBD
<b>Kegiatan : Pengelolaan Terminal Tipe C</b>			
<b>Sub Kegiatan :</b>			
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C	Kelancaran Pengelolaan Terminal Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	APBD
<b>Sub Kegiatan :</b>			

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Optimalisasi dan operasional perparkiran	Jumlah Dokumen Survei Titik Potensi Parkir	APBD
<b>Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>			
<b>Sub Kegiatan :</b>			
Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	APBD
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	APBD
Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	APBD
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	APBD
<b>Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>			
<b>Sub Kegiatan :</b>			
Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatkan kelancaran, keselamatan dan keamanan lalu lintas	Jumlah Dokumen Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	APBD
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatkan kelancaran, keselamatan dan keamanan lalu lintas	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	APBD

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - OPD) Tahun 2024- 2025 pada Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar merupakan bagian dari Renstra Dinas perhubungan Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027 yang perlu didukung dan dibantu oleh seluruh Instansi, Lembaga, Unit Kerja dan Masyarakat (stakeholders) dalam pelaksanaannya..

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - OPD) ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar.

Pematang Siantar, 07 Februari 2023

Pdt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PEMATANG SIANTAR

  
**Drs. JULHAM SITUMORANG, M.Si**  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19700528 199601 1 001